Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah

The Head of District's Abuse of Power on Issuing Land Reference

Didik Efrianto

Kepolisian Republik Indonesia

E-mail: masdidik_er@yahoo.com

Herman

Pascasarjana Universitas Halu Oleo

E-mail: man.herman@uho.ac.id

Oheo K. Haris

Pascasarjana Universitas Halu Oleo

E-mail: oheokh@gmail.com

Abstract: *This research is intended at examining on issuing land reference out of his or her authority who qualified committed to crime offence. Furthermore, this paper analyzing the Head of Village's responsibility that was issuing the land reference letter which was out of his or her authority. This study applied legal research which is used legislations, concepts, and case approach. This paper answered the question which administratively that is the land reference letter considered as the unofficial evidence which is not has as power as an authentic letter. But then this letter is categorized the rights or official land letter requirement toward registered land as mentioned in land legislation. The power evidence of land reference letter issued by the head of village was accordingly stated on the Government Ordinance 24 Year 1997 concerning land registration. Afterwards, in the term of land transaction, this condition legally become has a legal power if assigned by the head of sub-district as official administrator. To sum up, based on the head of village's responsibility is not qualified as crime offence due to article 39 paragraph 1 letter b point 1 and 2 of the Government Ordinance 24 Year 1997. This must be consider that the head of village has legal power to issue the land reference letter as an right evidence for those settled such a land.*

Keyword: *Abuse of Power; Village Head; Letter*

Abstrak: *Penelitian ini ditujukan untuk menguji penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di luar wewenangnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa yang menerbitkan surat keterangan tanah di luar wewenangnya. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan jawaban adalah secara administratif Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta*

otentik. Namun karena surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan. Kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang dibuat oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Selanjutnya, berdasarkan tanggung jawab Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dapat dikategorikan tindak pidana karena merujuk bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Harus diketahui bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut.

Kata kunci: Penyalahgunaan; Kepala Desa; Surat

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Artinya kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman¹. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Sebagai alasan dalam Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum pidana ataupun dituntut menurut hukum perdata.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah².

¹ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2003, hlm. 24.

² Efendi Parananginangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hlm. 3.

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintahan pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya daerah³.

Secara teoritis dan praktik, terdapat perbedaan antara Pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas Pemerintah, sedangkan pemerintahan ialah organ atau alat/aparat yang menjalankan pemerintahan⁴. Sehingga istilah lain pemerintahan dan pemerintah dalam masyarakat secara umum diartikan sama, dimana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Mulai dari Presiden hingga kepala desa, artinya semua orang yang memegang jabatan disebutlah Pemerintah atau Pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah dan atau pemerintahan disebut orang pemerintahan⁵. Montesquie mengartikan pemerintahan dalam arti luas meliputi: pembentukan Undang-Undang (*la-puissance legislative*); pelaksanaan (*la-puissance executive*); dan peradilan (*la-puissance de juger*). Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan ajaran tentang pembagian kekuasaan negara yang populer disebut dengan “trias politika”⁶.

³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 17.

⁴ Ridwan H.R sebagaimana dikutip oleh Yulia Netta dan M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara (Dasar-Dasar Teori Bernegara)*, Bandar Lampung: PKK-PUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 70.

⁵ Didik Sukaryono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Malang: Setara Press, 2010, hlm. 57.

⁶ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008, hlm. 42.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” Hal ini menegaskan adanya suatu prinsip pemerintahan yang berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Desa, desa merupakan salah satu instrumen pemerintah yang menjalankan suatu urusan pemerintahan dalam lingkup yang lebih sempit. Berdasarkan dengan Undang-Undang *quo* itulah yang kewenangan-kewenangan desa terakomodasi dan mampu dijalankan secara legalitas.

Melalui konsepsi Pemerintahan Desa inilah, kewenangan-kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan maupun administrasi itu melekat kepada kepala desa sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dimana mampu dijalankan oleh kepala desa yang salah satunya dalam kaitan kepala desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Secara umum Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional” dan selanjutnya berdasarkan Pasal 6 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa⁷: Pasal 6 ayat (1): “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.” Pasal 6 ayat (2): “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Jika menilai konstruksi hukum mengenai kewenangan kepala desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah, maka kepala desa dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) PP No. 24/1997. Kewenangan mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah dapat dikeluarkan oleh kepala desa sebagaimana kepala desa bertindak atas wewenang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara yang diberikan oleh Menteri terkait. Namun, kepala desa yang bertindak

⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara hanya dapat menjalankan wewenang tersebut berdasarkan dengan wilayah administrasi pemerintahan desa tersebut.

Salah satu penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terjadi yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah di wilayah Kecamatan Morosi. Kecamatan Morosi merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Bondoala. Salah satu desa yang setelah pemekaran pada tahun 2013 itu menjadi bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Morosi adalah Desa Paku Jaya, Desa Paku Jaya kemudian dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Paku Jaya (sebagai desa induk) dan Desa Tondowatu.

Riwayat Tanah bahwa sebelum pemekaran pada tahun 1995 Kepala Desa Paku Jaya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah salah satu warganya yang berada di Desa Paku Jaya tersebut, tahun 2013 tanah yang awalnya berada di Desa Paku Jaya, karena pemekaran tanah itu secara administratif berada di Desa Tondowatu, diterbitkan lagi Surat Keterangan Tanah (SKT)-nya namun bukan oleh Kepala Desa Tondowatu tapi oleh Kepala Desa Morosi.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepala desa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) namun hanya untuk tanah yang berada di wilayah administrasi pemerintahannya. Akibat lahirnya Surat Keterangan Tanah (SKT) ini, maka Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dapat digunakan sebagai legalitas dalam transaksi jual beli hak atas tanah di wilayah Kecamatan Morosi.

Berdasarkan dengan Fakta di atas, dapat dikatakan bahwa kepala desa Morosi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa ada kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kepala desa. Walaupun seorang Kepala Desa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Karena pada dasarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka lahir pembatasan suatu keberlakuan maupun kewenangan dari seorang kepala desa dalam hal menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah.” Untuk itu latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka secara konkret, Rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan mengenai penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di luar wewenangnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak

pidana. Selain itu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa yang menerbitkan surat keterangan tanah di luar wewenangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum⁸, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁹.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerbitan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa di Luar Kewenangannya

Penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terjadi yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah di wilayah Kecamatan Morosi. Kecamatan Morosi merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Bondoala. Salah satu desa yang setelah pemekaran pada tahun 2013 itu menjadi bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Morosi adalah Desa Paku Jaya, Desa Paku Jaya kemudian dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Paku Jaya (sebagai desa induk) dan Desa Tondowatu. Riwayat Tanah bahwa sebelum pemekaran pada tahun 1995 Kepala Desa Paku Jaya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah salah satu warganya yang berada di Desa Paku Jaya tersebut, tahun 2013 tanah yang awalnya berada di Desa Paku Jaya, karena pemekaran tanah itu secara administratif berada di Desa Tondowatu, diterbitkan lagi Surat Keterangan Tanah (SKT)-nya namun bukan oleh Kepala Desa Tondowatu tapi oleh Kepala Desa Morosi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Desa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) namun hanya untuk tanah yang berada di wilayah administrasi pemerintahannya.

Akibat lahirnya Surat Keterangan Tanah (SKT) ini, maka Surat Kepemilikan Tanah (SKT) tersebut dapat digunakan sebagai legalitas dalam transaksi jual beli hak atas tanah di wilayah Kecamatan Morosi. Berdasarkan dengan Fakta di atas, dapat dikatakan bahwa kepala desa

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

Morosi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa ada kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kepala desa. Walaupun seorang Kepala Desa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Karena pada dasarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka lahir suatu pembatasan suatu keberlakuan maupun kewenangan dari seorang kepala desa dalam hal menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. Surat Keterangan tanah tersebut merupakan satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah¹⁰.

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak¹¹. Dan dapat pula diketahui tentang kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b) Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c) Penerbitan sertifikat;
- d) Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Surat keterangan tanah (SKT) di buat dalam pemindahan hak atas tanah yang pembuatannya melalui Kepala Desa dan diterbitkan oleh camat. Dalam penerbitan surat keterangan tanah adalah hal yang terpenting bagi para pemilik tanah untuk dapat diterbitkan secara cepat dan biaya yang murah. Kehendak ini pun sangat dimaklumi, karena peraturan pendaftaran tanah pun memang sudah mengamanatkan demikian kepada Badan Pertanahan Nasional.

Hal ini sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah, antara lain sederhana dan terjangkau¹². Sederhana artinya prosedur penerbitan surat keterangan tanah harus mudah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedangkan terjangkau artinya biaya pendaftaran tanah harus memperhatikan kemampuan masyarakat ekonomi lemah, khususnya golongan tidak mampu. Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dikuatkan oleh Camat

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf I.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Penjelasan Pasal 24 ayat (1).

¹² Ardian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 60-61.

yang berisikan keterangan tentang pembuktian hak atas tanah adat yang belum terdaftar, sehubungan tanah tersebut akan dialihkan atau akan diajukan permohonan haknya¹³.

Jadi, sahnya surat keterangan tanah adalah sejak dikuatkan dengan ditanda tangani oleh Camat sebagai kepala kecamatan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:

Ayat (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Ayat (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan¹⁴.

Adapun landasan hukum mengenai surat keterangan tanah berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Permenag Nomor 3/1997 yang menjelaskan bahwa: dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:

- a) Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak- pihak lain yang telah menguasainya,

¹³ Upik Hamidah, "Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)", Jurnal Ilmu Hukum Flat Justitia, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 5

¹⁴ *Ibid.*

sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih.

2. Bahwa penguasa tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
 3. Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
 4. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
 5. Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.
- b) Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsi sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang memuat tentang surat keterangan tanah maka dapat disimpulkan bahwa surat keterangan tanah merupakan surat yang menjelaskan riwayat tanah seseorang yang berisi tentang identitas yang menguasai tanah, batas-batas tanah, saksi-saksi dan diterbitkan oleh dari Kepala Desa/Lurah atas permohonan dari pemohon. Hal ini dapat juga disesuaikan dengan pendapat Abdul Rauf Alauddin Said, yang mengatakan bahwa proses pelaksanaan penyelenggara pemerintahan di Indonesia terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal pembagian urusan rumah tangganya atau dalam bahasa perundang-undangan disebut sebagai urusan pemerintahan.

Menurut Ni'matul Huda pada hakikatnya urusan pemerintahan terbagi atas dua kelompok yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah tanpa adanya asas desentralisasi dan urusan pemerintahan lain yang diselenggarakan dengan asas desentralisasi¹⁵. Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan

¹⁵ Ni'matul Huda, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, Oktober- Desember, 2015, hlm. 582-583.

sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertifikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertifikat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Surat keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah. Prosedur Pengajuan Kepemilikan Tanah Masyarakat Yang Tidak Lengkap/Sama Sekali Tidak Mempunyai Bukti Kepemilikan. Sehingga menurut peneliti yang harus dilakukan adalah:

- a) Dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan (tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/ tidak dalam sengketa; tidak termasuk aset pemerintah atau pemerintah daerah; tidak termasuk kawasan hutan).
- b) Surat pernyataan tersebut dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut.
- c) Tanggung Jawab Hukum Kepala Kelurahan dan kepala desa terhadap keterangan yang diberikan dalam kaitannya dengan penerbitan surat penguasaan tanah.

Kewenangan Kelurahan/Desa Menerbitkan Surat Penguasaan Tanah, untuk itu adapun Kewenangan Kelurahan/desa Menerbitkan surat penguasaan tanah Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci di jelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka terkait hak menguasai Negara, maka Negara berwenang untuk¹⁶:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- d) Hak penguasaan Negara atas tanah merupakan tugas pemerintah pusat yang mendapat pembantuan dari pemerintah daerah.
- e) Peranan pembantuan dari pemerintah daerah dapat diketahui dengan adanya peraturan daerah yang mengatur terkait persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa/Kelurahan dan perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan. Kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Kewenangan Kelurahan/Desa secara terperinci diatur Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁷:

Ayat (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara implisit, penjelasan ini tidak menyebutkan kewenangan Kepala Desa. Akan tetapi dalam Pasal 34 huruf d menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan tanah kas desa.

Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa, bahwa dapat dipahami kedudukan kepala desa dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berbunyi: “ untuk desa-desa dalam wilayah terpencil, menteri dapat menunjuk PPAT sementara”. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah, yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa/Kelurahan.

Kewenangan Kepala Desa/Lurah/Camat dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa. Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah,⁸ oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertifikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertifikat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Surat keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Surat keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Prosedur Pengajuan Kepemilikan Tanah Masyarakat Yang Tidak Lengkap/ Sama Sekali Tidak Mempunyai Bukti Kepemilikan.

Suatu hal dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan

tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan (tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/ tidak dalam sengketa; tidak termasuk aset pemerintah atau pemerintah daerah; tidak termasuk kawasan hutan). Surat pernyataan tersebut dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut. Tanggung Jawab Hukum Kepala Kelurahan dan kepala desa terhadap keterangan yang diberikan dalam kaitannya dengan penerbitan surat penguasaan tanah.

Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Menerbitkan Surat Keterangan Tanah di Luar Kewenangannya

Akibat Hukum Surat Keterangan Tanah yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa di luar Wilayah Pemerintahan Desanya, sehingga Penelitian ini menunjukkan suatu akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian. Baik kerugian materi maupun kerugian non-materi. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum administrasi dikenal istilah kewenangan atau wewenang, yang sering kali disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*". Ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: Pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)¹⁸. Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

¹⁸ Philipus M. Hadjon, "*tentang Wewenang*", Yuridika, Volume No. 5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm. 1.

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggungjawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan mal administrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Dalam kaitan dengan tindak pemerintahan, tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubung dengan adanya mal administrasi. Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadi apabila terdapat unsur mal administrasi. Tanggung gugat TUN pada dasarnya adalah tanggung gugat jabatan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a) peraturan perundang-undangan; dan
 - b) AUPB.

Penggunaan wewenang ini tentunya harus sesuai tujuannya, sehingga perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MA. Putusan ini membahas soal pengertian *detournement de pouvoir* yaitu “menyalahgunakan wewenang” yang diberikan. Seseorang yang memiliki jabatan, dimana jabatan itu secara hukum diberikan “wewenang”, dan wewenang itu

seharusnya digunakan sebagaimana mestinya, tetapi ia menyalahgunakan wewenang tersebut¹⁹.

Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Indriyanto Seno Adji memberikan perspektif tentang penyalahgunaan kewenangan dalam 3 bentuk:

- a) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
- b) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Tiga bentuk pengertian tersebut secara maknawi menjadi domain kajian hukum administrasi.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya mengatur lebih lanjut tentang larangan penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b) melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b) bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

¹⁹ Aldin, Oheo K.Haris, Sabrina Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran", Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol 1, No 2, 2019, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6789/5143>, hlm.6.

b) bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.

KESIMPULAN

Secara administratif Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Namun karena surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan. Maka kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang dibuat oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Sehingga Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tidak dapat dikatakan telah menyalahi wewenangnya dalam memberikan alas hak atas tanah bagi masyarakat. Berdasarkan tanggung jawab Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dapat dikategorikan tindak pidana karena merujuk bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dapat diketahui bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut. Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa. Surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.

Daftar Pustaka

Buku

- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Netta, Yulia dan M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara (Dasar-Dasar Teori Bernegara)*, Bandar Lampung: PKK-PUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Parananginangin, Efendi, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Sukaryono, Didik, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Malang: Setara Press, 2010.
- Sutedi, Ardian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal dan Makalah

- Aldin, Oheo K.Haris, Sabrina Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol 1, No 2, 2019, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6789/5143>.
- Hadjon, Philipus M., “tentang Wewenang”, *Yuridika*, Volume No. 5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Hamidah, Upik, “Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)”, *Jurnal Ilmu Hukum Flat Justitia*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Huda, Ni’matul, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, Oktober-Desember, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.